

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA NIK DALAM REGISTRASI KARTU SIM
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Ponorogo



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA NIK DALAM
REGISTRASI KARTU SIM

Nama : Arfian Rodhea Bayu Saputra
NIM : 22710364
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah,
SH, M.Hum)
NIDN. 2108048001

Ponorogo, 10 Juli 2026

Pembimbing II

(Dr. Vogi Prasetyo, SH, MH)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Program Studi Ilmu Hukum



(U. Setiawan, S.H., M.H)
NIDN. 0709019702

Dosen Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 28 Agustus 2026



Arfian Rodhea Bayu Saputra
NIM. 22710364

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Data NIK dalam Registrasi Kartu SIM”. Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) untuk registrasi kartu SIM guna mencegah kejahatan, namun di sisi lain kebijakan tersebut memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai perlindungan data NIK serta mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini terhadap penyalahgunaannya dalam proses registrasi kartu SIM.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif mengenai perlindungan data NIK dalam registrasi kartu SIM di Indonesia saat ini masih bersifat terfragmentasi dan belum komprehensif, mencakup UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) karena belum adanya delik pidana yang secara spesifik mengatur perbuatan penyalahgunaan NIK khusus untuk registrasi kartu SIM. Kebijakan hukum pidana saat ini dinilai belum optimal, baik pada tahap formatif (perumusan delik), aplikatif (penerapan oleh penegak hukum yang cenderung menggunakan pasal umum), maupun administratif (mekanisme pengawasan).

Sebagai kesimpulan dan saran, penelitian ini mendorong perlunya pembaharuan kebijakan hukum pidana (*ius constituendum*) melalui perumusan delik pidana khusus penyalahgunaan NIK dalam registrasi kartu SIM, penguatan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, serta integrasi pendekatan penal dan non-penal untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi hak privasi warga negara.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Data, NIK, Registrasi Kartu SIM, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Criminal Law Policy on the Misuse of NIK Data in SIM Card Registration". The background of this research is the government policy that requires the use of Population Identification Numbers (NIK) and Family Cards (KK) for SIM card registration to prevent crime, but on the other hand the policy increases the risk of leakage and misuse of personal data belonging to the public. The purpose of this study is to analyze Indonesia's positive legal arrangements regarding NIK data protection and evaluate the current criminal law policies against its misuse in the SIM card registration process.

The research method used is normative (doctrinal) legal research that is prescriptive-analytical. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are collected through literature studies and analyzed qualitatively juridical.

The results of the study show that positive legal arrangements regarding NIK data protection in SIM card registration in Indonesia are currently still fragmented and not comprehensive, including the Population Administration Law, ITE Law, and Personal Data Protection Law (PDP Law). There is a legal gap because there is no criminal offense that specifically regulates the misuse of NIK specifically for SIM card registration. Criminal law policy is currently considered to be not optimal, both at the formulative stage (formulation of delicacies), applicative (application by law enforcers who tend to use general articles), and administrative (supervision mechanisms).

As a conclusion and suggestion, this study encourages the need to reform the criminal law policy (*ius constituendum*) through the formulation of special criminal offenses for the misuse of NIK in SIM card registration, the strengthening of independent personal data protection supervisory institutions, and the integration of penal and non-penal approaches to provide more effective protection for citizens' privacy rights.

Keywords: Criminal Law Policy, Data Misuse, NIK, SIM Card Registration, Personal Data Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Data NIK dalam Registrasi Kartu SIM di Indonesia”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua, keluarga, dan seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi.

Ponorogo, September 2026

Penulis,



Arkan Rodhea Bayu Saputra
NIM. 2710364

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN	iv
ABTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi dan Nomor Induk Kependudukan	5
B. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).....	8
C. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Privasi.....	11
D. Teori Tujuan Pemidanaan dan Kriminalisasi.....	15
E. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional.....	17
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Kerangka Teoritis	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
C. Sumber dan Jenis Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	28
F. Teknik Keabsahan Data.....	29
DAFTAR PUSTAKA	1